

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Cina dan Rusia menjadi dua negara yang memiliki sejarah panjang. Hubungan keduanya juga diketahui semakin lama semakin membaik dan konstan. Dengan kondisi geografis yang saling berdekatan dan kemiripan dalam gaya pemerintahan, tidak heran jika kedua negara tersebut memiliki hubungan tetangga yang baik. Kemudian seiring berjalannya waktu hubungan keduanya tidak berhenti hanya sebagai tetangga, akan tetapi memunculkan hubungan kerjasama yang konstruktif dan pada akhirnya memantapkan masing-masing niat yang ditunjukkan dengan hubungan yang kemitraan dan koordinasi strategis yang komprehensif (Korolev, 2018). Tren positif ini dipertahankan dan terus ditingkatkan sampai saat ini dimana dunia sudah mencapai tahap modern.

**Gambar 1.1** Peta Geografis Cina-Rusia



Sumber: Russia, Barry's Borderpoints (2023)

Presiden Putin bahkan menganggap Cina sebagai partner dan sekutu yang natural (Korolev & Portyakov, 2019). Cina juga pandai memposisikan dirinya

dengan tidak terlalu ikut campur dan mengeluarkan pernyataan-pernyataan kontroversial terkait krisis Ukraina tahun 2014 dan Krisis Kaukasus tahun 2008. Begitu pula dengan Rusia dimana ketika terjadi peristiwa yang menggemparkan dunia dengan adanya pemberitaan mengenai genosida terhadap kaum minoritas Uighur di Cina yang dilakukan oleh pemerintah Cina. Rusia menyikapi pemberitaan tersebut dengan mengeluarkan yang dinilai membela pemerintah Cina. Rusia menyebutkan bahwa pemberitaan mengenai genosida etnis Uighur tidak benar adanya dan merupakan kebohongan Barat (Rozanskif, 2021). Selain itu juga, Rusia juga tidak pernah menunjukkan sikap kontra terhadap sengketa Laut Cina Selatan.

Hubungan kedua negara dapat dilihat sebagai hubungan yang tidak mendukung maupun tidak menentang atau setidaknya mereka bersikap netral dan tidak terlalu memihak kepada oposisi masing-masing. Hubungan ini pula yang mendasari kerjasama-kerjasama bilateral keduanya. Kerjasama yang dibuat oleh Rusia dan Cina mencakup berbagai bidang seperti ekonomi, energi, industrialisasi, infrastruktur, teknologi dan militer. Kedua negara juga berkomitmen untuk menjadi poros global baru menggantikan Barat yang sudah lama berkuasa. Keduanya memiliki kepentingan yang sama dan jarang terjadi *conflict of interest* diantara mereka. Modal ini pula yang menjadikan kisah indah Rusia dan Cina bertahan sampai sekarang. Setidaknya begitu harapan mereka sampai terjadinya perang Ukraina-Rusia pada Februari 2022.

Peristiwa perang Ukraina-Rusia yang saat ini masih menjadi bahan pembicaraan dunia internasional dan sudah memasuki umur satu tahun pada

tanggal 24 Februari 2023 lalu. Perang Ukraina-Rusia menjadi peristiwa besar pada tahun 2022 dan mendapatkan perhatian global (Papava, 2022). Perang ini berawal dari keinginan Ukraina yang ingin bergabung dengan NATO yang notabene merupakan organisasi pertahanan militer di bawah komando dari Amerika Serikat. Melihat hal tersebut, Rusia sebagai rival Amerika Serikat wajar jika merasa terancam dikarenakan letak geografis kedua negara yang saling berbatasan langsung (Sommerlad, 2022). Kemudian Presiden Putin melancarkan invasi di bawah label Operasi Militer Khusus akibat dari eskalasi ketegangan keinginan Ukraina untuk bergabung dengan NATO yang berujung pada terjadinya perang antara Ukraina dengan Rusia.

Sudah satu tahun berlalu semenjak meletusnya perang pada tanggal 24 Februari 2022. Selama itu pula muncul berbagai dinamika dikarenakan adanya campur tangan dari Amerika Serikat dan sekutunya dalam perang ini. Hal ini tidak aneh mengingat organisasi NATO yang ingin diikuti oleh Ukraina sendiri berada di bawah kekuasaan Barat. Ukraina yang didukung oleh Barat dan sekutunya dengan mengatasnamakan kemanusiaan turut andil untuk menghentikan invasi Rusia. Sementara itu, Rusia yang seakan-akan menahan sendiri gempuran dari barat juga mengharapkan bantuan dari rekan lama yaitu Cina.

Cina mengambil posisi netral dalam perang yang terjadi antara Ukraina dengan Rusia. Akan tetapi posisi Cina mulai berubah selama satu tahun berjalannya perang. Melalui diplomatnya, Wangi Yi, Cina melakukan tur politik ke Eropa dan mengumumkan bahwa pihak pemerintah Cina sudah membuat sebuah *plan* atau rencana dalam bentuk *position paper* (Bachulska, 2023). *Plan*

tersebut dinamakan *Chinese's peace plan* yang berisi 12 poin. Isi dari *plan* itu sendiri membahas mengenai bagaimana pandangan Cina terhadap situasi yang mengancam keamanan global. Cina berusaha untuk menjadi *peacemaker* dengan menawarkan solusi yang dapat diambil dalam perang. Cina juga turut mempromosikan mengenai pentingnya menghargai kedaulatan suatu negara, dalam konteks ini secara tidak langsung Cina berbicara mengenai Ukraina, kemudian di satu sisi Cina juga berbicara mengenai melindungi kepentingan nasional yang merujuk kepada Rusia (Wong, 2023). Semua hal itu tertera di dalam *plan* yang dikeluarkan oleh pemerintah Cina melalui diplomat Wangi Yi ketika berada di Eropa.

Pemerintah Cina seolah-olah bermain dengan kata-kata dan membuat masyarakat global percaya bahwa intensi Cina adalah baik seiring dikeluarkannya *plan* tersebut. Cina melalui representasi khususnya menyatakan niatnya untuk memfasilitasi pembicaraan damai atas situasi di Ukraina namun dengan syarat mempertimbangkan hubungan baik Cina dengan Rusia (McCarthy, 2023). Dengan kata lain Cina ingin menyampaikan bahwa Cina ingin dikenal sebagai negara paling depan dalam mempromosikan perdamaian dan juga keinginan untuk menjalin hubungan lebih dekat dengan Rusia.

Kedekatan kedua negara menjadi hal penting dikarenakan Rusia diketahui meminta bantuan kepada Cina dalam hal militer dan ekonomi di tengah sanksi dari Barat (Ellyatt, 2023). Di satu sisi Cina dapat kehilangan mitra dagang terbesar mereka yaitu Rusia jika Cina memilih untuk mempromosikan perdamaian dengan mengancam tindakan Rusia. Di sisi lain, ketika Cina ingin lebih dekat

dengan Rusia maka lambat laun akan muncul kecurigaan bahwa Cina membantu Rusia dalam melancarkan invasinya ke Ukraina dikarenakan hubungan hangatnya dengan Rusia. Orang-orang akan berpikir bahwa keinginan untuk menjadi negara yang mempromosikan perdamaian global hanyalah omongan belaka dan hal itu tentu saja akan menjadi buruk bagi citra Cina di mata masyarakat global.

Kaitannya dengan hubungan Cina dan Rusia semasa perang berlangsung, Cina yang mengambil posisi netral dicurigai sudah mengubah posisi mereka yang condong membantu Rusia dalam memenangkan perang (McDonnell, 2023). Meskipun baru dicurigai, Cina dikatakan menyuplai teknologi yang masuk dalam kategori *dual-use* dimana selain dapat digunakan untuk keperluan sipil teknologi tersebut juga dapat digunakan untuk keperluan militer. Selain itu, Cina juga menjelma menjadi partner dagang terbesar Rusia semenjak Rusia dijatuhi hukuman sanksi ekonomi oleh Amerika Serikat.

Cina yang mengabaikan sanksi-sanksi tersebut tetap menjalankan transaksi dengan Rusia sehingga mencatatkan kenaikan sampai 30% atau sebesar \$190 miliar pada tahun 2022 (Check, 2023). Cina dikatakan juga masih membeli minyak mentah dan gas dari Rusia dikala Rusia sudah kehilangan pasarnya di Eropa akibat sanksi yang dikeluarkan oleh Uni Eropa untuk pelarangan impor minyak mentah dan gas dari Rusia. Ekspor gas alam Rusia ke Cina meningkat dalam 11 bulan terakhir dan menyentuh angka 80 ton (Reuters, 2023).

Neraca transaksi perdagangan kedua negara menjadi salah satu faktor sumber daya Rusia bertahan cukup lama dan kemungkinan memperpanjang perang dengan Ukraina. Bahkan perdagangan diantara keduanya memecahkan

rekor sebelumnya yaitu \$190 triliun pada tahun 2022 menjadi \$200 triliun pada tahun 2023 (Hawkins, 2023). Pemindahan atau transfer teknologi dan sumber daya yang terjadi diantara keduanya dapat dikatakan menjadi modal bagi Rusia untuk terus melanjutkan perang yang mana hal tersebut mencederai pernyataan keamanan dan perdamaian global.

Perang Ukraina-Rusia ini dapat dikatakan sebagai perang antara Rusia dengan Barat. Hal ini dikarenakan perang yang sedang terjadi dapat digolongkan sebagai perang proksi antara Barat dengan Rusia (Toft, 2022). Situasi ini tidak mengherankan mengingat bagaimana Barat dan Rusia memiliki hubungan yang menegang sejak dahulu. Masyarakat Rusia juga dikenal memiliki sentimen anti-barat dikarenakan sejarah di antara keduanya. Maka dari itu tidak aneh jika melihat sikap Cina yang seolah-olah bertindak diluar keinginan Barat dengan tetap mempertahankan hubungannya dengan Rusia. Cina juga dikenal memiliki sentimen anti-barat yang kuat akibat faktor historis antara Barat dengan Cina. Dengan alasan tersebut, keduanya tetap mempertahankan hubungan baik dikarenakan mereka saling menjadi aliansi terbesar bagi satu sama lain. Cina dan Rusia memiliki kesamaan yaitu sama-sama memiliki sikap anti-barat yang tersebar di masyarakat mereka. Hal ini kemudian menjadi identitas mereka.

Identitas memainkan peranan penting dalam pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara. Sama halnya dengan dengan kesamaan sentimen anti-barat antara Cina dan Rusia serta sejarah panjang hubungan keduanya kemudian akan memunculkan identitas kolektif sehingga membentuk hubungan aliansi yang kuat. Sikap Cina ini menjadi menarik untuk diteliti dikarenakan bagaimana cara Cina

membagi prioritas untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya dan menjaga citra baiknya di mata masyarakat global. Apakah Cina akan menjadi jalan keluar dan memecah kebuntuan yang dialami oleh Rusia atau Cina akan menjadi musuh terbesar Rusia. Dengan premis tersebut maka penelitian ini dibuat.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang diangkat oleh penulis pada penelitian ini adalah bagaimana identitas kolektif anti-barat berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri Cina dalam hubungannya dengan Rusia dalam merespon Perang Ukraina-Rusia tahun 2022?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai bagaimana identitas kolektif anti-barat mempengaruhi kebijakan luar negeri Cina terkait hubungannya dengan Rusia.

### **1.3.2. Tujuan Khusus**

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana langkah yang diambil dalam kebijakan luar negeri dan posisi Cina terkait hubungannya dengan Rusia dengan mempertimbangkan faktor identitas kolektif anti-barat dan kepentingan nasional Cina.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Akademis**

Manfaat akademis pada penelitian ini adalah dapat menjadi sumber wawasan tambahan bagi para peneliti HI maupun masyarakat umum mengenai identitas Cina serta kebijakan luar negeri Cina dan hubungannya dengan Rusia.

### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis penelitian ini adalah dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi para pembuat kebijakan agar mengetahui bagaimana hubungan antara identitas kolektif anti-barat dan kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh Cina terhadap hubungannya dengan Rusia sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan.

## **1.5. Kerangka Pemikiran Konseptual**

Penelitian ini didasarkan pada penelitian terdahulu yang menggunakan konsep identitas dalam melihat pengaruhnya terhadap kebijakan luar negeri suatu negara. Pada tahun 2018, Aydin-Düzgit (2018) dalam tulisannya yang berjudul *Foreign Policy and Identity Change: Analysing Perceptions of Europe among the Turkish Public* mencoba untuk melihat bagaimana adanya perubahan kebijakan luar negeri Turki terhadap Uni Eropa dikarenakan faktor kebangkitan politik islam. Semenjak kebangkitan politik Islam, keinginan publik untuk bergabung ke dalam keanggotaan regional Uni Eropa menurun drastis. Hal ini sangat berbanding terbalik ketika Uni Eropa yang dahulu mempersulit dan memperlama penggabungan Turki ke dalam Uni Eropa. Akibatnya, banyak masyarakat yang

merasa frustrasi dengan hal ini. Masyarakat Turki melihat bahwa Eropa merupakan wilayah yang maju dan makmur. Bergabungnya Turki dengan Uni Eropa diharapkan dapat membuat Turki ikut lebih maju juga.

Aydin-Düzgit berargumen bahwa berubahnya opini dan dukungan masyarakat terhadap bergabungnya Turki ke Uni Eropa dikarenakan beberapa hal. Faktor pertama adalah banyak dari masyarakat muslim Turki melihat Eropa sebagai sarang sekuler dan agama Kristen yang sangat berseberangan dengan agama Islam yang notabene mayoritas di Turki. Ditambah dengan kebangkitan politik Islam, suara penolakan menjadi semakin keras. Ditambah dengan presiden Erdoğan yang juga mulai skeptis terhadap keuntungan dan nilai dari Uni Eropa. Faktor kedua adalah krisis dalam badan Uni Eropa itu sendiri. Dewasa ini, Uni Eropa mendapati dirinya tengah berada dalam masa krisis ekonomi, krisis pengungsi dan lonjakan populasi yang drastis. Dengan keadaan yang tidak stabil seperti itu, banyak masyarakat Turki yang berubah pikiran dengan keinginan untuk bergabung dengan Uni Eropa.

Terakhir, Aydin-Düzgit menyimpulkan bahwa opini publik Turki yang erat dengan identitas Islam nya membuat Erdoğan untuk merubah keputusan dan keinginan untuk bergabung dengan Uni Eropa karena dianggap tidak sesuai dengan apa yang negara Turki ikuti. Identitas Turki sebagai negara Islam menentukan sikap Erdoğan sebagai elit politik untuk berpikir ulang mengenai kebijakan luar negerinya.

Penelitian lainnya mengenai identitas dan kebijakan luar negeri adalah tulisan yang berjudul *State Identity in Iranian Foreign Policy* karya Shahram Akbarzadeh dan James Barry (2016). Akbarzadeh dan Barry berargumen bahwa bagaimana identitas Iran yang terdiri dari tiga elemen yaitu Iranisme, Islam dan Shi'isme mempengaruhi kebijakan luar negeri Iran. Ketiga elemen tersebut memainkan peran signifikan mengenai bagaimana Iran bersikap di ranah internasional. Lebih lanjut, Akbarzadeh dan Barry memberikan deskripsi dari ketiga elemen tersebut. Iranisme diambil dari ide bahwa Iran merupakan negara yang kaya akan sejarah dan kebudayaan. Islam menjadi poin penting dari kebijakan luar negeri Iran dikarenakan menjadi agama mayoritas di sana. Kemudian Shi'isme yang merupakan cabang dari kepercayaan Islam yang paling banyak diikuti masyarakat Iran yang memberikan unsur keunikan di dunia Islam.

Akbarzadeh dan Barry mengatakan bahwa ketiga elemen identitas tersebut membuat kebijakan luar negeri Iran menjadi tegas dan defensif. Iran mencoba untuk menyebarkan nilai-nilai luhur Islam kepada dunia dan di sisi lainnya mencoba juga untuk mempertahankan keamanan dan kepentingan nasionalnya menghadapi ancaman dari Barat. Identitas ini menjadi penting dikarenakan memiliki sifat yang kompleks dan selalu berkembang. Maka dari itu, tidak heran jika di masa sekarang maupun masa depan, kunci untuk memahami kebijakan luar negeri Iran terletak pada identitas negara mereka.

Teori konstruktivis dalam studi hubungan internasional menekankan pentingnya ide, norma, dan identitas dalam membentuk perilaku aktor-aktor

internasional. Teori ini berpendapat bahwa realitas internasional tidak hanya ditentukan oleh kekuatan material, seperti kekuatan militer atau ekonomi, tetapi juga oleh makna yang diberikan oleh aktor-aktor tersebut kepada elemen-elemen tersebut. Konstruktivis percaya bahwa interaksi antara negara-negara dan aktor-aktor internasional lainnya membentuk pandangan bersama tentang apa yang dianggap penting, baik dalam hal keamanan, kerjasama, atau konflik. Salah satu konsep kunci dalam teori konstruktivis adalah identitas kolektif. Identitas kolektif merujuk pada pandangan bersama dan persepsi yang dibagikan oleh kelompok-kelompok aktor internasional tentang siapa mereka dan bagaimana mereka berhubungan satu sama lain. Identitas kolektif dapat mempengaruhi perilaku negara-negara dan aktor-aktor lain dalam arena internasional. Identitas ini terbentuk melalui proses sosial, di mana norma-norma, nilai-nilai, dan interpretasi sejarah berperan penting.

Penelitian kali ini tidak hanya berfokus kepada pengaruh identitas satu negara terhadap *output* kebijakan luar negeri negara tersebut saja akan tetapi bagaimana identitas menjadi sebuah identitas kolektif dalam kelompok negara. Dalam konteks penelitian ini, kita akan meneliti bagaimana sentimen anti-Barat menjadi sebuah identitas kolektif bagi Cina dan Rusia dalam menjalani hubungan bilateral serta bagaimana pengaruhnya terhadap kebijakan luar negeri Cina terhadap Rusia.

### **1.5.1. Identitas Kolektif**

Barnett dan Telhami (2002) dalam tulisannya yang berjudul *Identity and Foreign Policy in the Middle East* memberikan penjelasan mengenai apa itu

identitas. Secara sederhana, identitas merupakan sebuah ide mengenai personal, psikologi dan sosial dari seorang aktor yang dipengaruhi oleh interaksi dan hubungan aktor tersebut dengan aktor lainnya. Identitas akan muncul ketika aktor tersebut kemudian memutuskan untuk berhubungan dan berinteraksi dalam tahap institusional. Berbicara dalam konteks studi Hubungan Internasional, maka sebuah negara akan menunjukkan identitasnya ketika negara tersebut berada dalam hubungan dengan negara lain. Identitas ini yang kemudian akan melekat dalam diri negara dan menentukan sikap atau tindakan apa yang akan diambil ketika berhubungan dengan negara lain.

Identitas yang merupakan salah satu basis dari teori konstruktivis dalam studi Hubungan Internasional percaya bahwa identitas dan kepentingan merupakan proses yang endogen atau tidak terpisahkan dalam sebuah interaksi (Wendt, 1992). Maka dari itu identitas dan kepentingan merupakan sesuatu yang terstruktur dan dipengaruhi oleh interaksi masyarakatnya. Identitas diklaim menjadi dasar dari adanya kepentingan (Wendt, 1992).

Wendt (1994) dalam bukunya yang berjudul *Social Theory of International Politics* menjelaskan bahwa identitas dapat dibagi lagi menjadi beberapa golongan salah satunya adalah identitas kolektif. Proses identifikasi kolektif membuat perbedaan identitas antar negara menjadi kabur yang pada akhirnya akan membentuk satu identitas baru yang melampaui semuanya. Akan tetapi, situasi dimana satu negara mengorbankan kepentingannya sendiri demi kelompok sangatlah jarang terjadi. Alhasil, identifikasi total sangat jarang ditemui dalam kelompok identitas kolektif.

Pada dasarnya, identitas kolektif membuat negara yang memiliki kesamaan identitas akan membentuk suatu kesadaran bersama sehingga menciptakan kebijakan luar negeri yang serupa juga. Maka dari itu, identitas kolektif dapat menjadi kepentingan nasional negara dan mendorong negara untuk bertindak demikian menurut identitas kolektif yang mereka miliki.

Identitas kolektif akan membuat negara yang memiliki identitas serupa akan merasa menjadi bagian dari sebuah kelompok dan memunculkan perasaan 'kita' dalam kelompok tersebut. Perasaan 'kita' tersebut yang kemudian akan membuat negara dalam satu kelompok identitas yang sama akan saling membantu dan mementingkan kesejahteraan kelompok di atas rasa ego masing-masing negara. Maka dari itu, ketika terdapat ancaman terhadap salah satu anggota kelompok tersebut atau bahkan seluruh anggota, mereka akan mencoba untuk mempertahankan kepentingan kelompok mereka. Hal ini dikarenakan unit yang bergerak untuk berpikir rasional adalah kelompok itu sendiri.

Wendt menyebutkan bahwa terdapat empat variabel yang dapat membentuk identitas kolektif yaitu ketergantungan, kesamaan nasib, homogenitas dan *self-restraint* atau menahan diri.

1. Saling ketergantungan. Saling ketergantungan tercipta ketika hasil dari interaksi antar negara tergantung pada pilihan satu negara lainnya. Pilihan satu negara tersebut kemudian akan saling mempengaruhi tindakan dari kedua belah pihak negara yang melakukan interaksi. Terdapat dua aspek yang menunjukkan ketergantungan yaitu sensitivitas dan kerentanan. Sensitivitas merujuk kepada untuk mengukur sejauh mana perubahan satu negara akan mempengaruhi negara

lain dalam satu hubungan. Kerentanan digunakan untuk mengukur berapa harga yang harus dibayar suatu negara untuk mengakhiri hubungannya dengan negara lain.

2. Kesamaan nasib. Kesamaan nasib dapat terjadi ketika dalam situasi terdapat tiga aktor yang saling berinteraksi kemudian aktor ketiga akan membuat atau mendefinisikan bahwa dua aktor pertama memiliki nasib yang sama dari hasil interaksi ketiga aktor ini. Kesamaan nasib akan mendorong terjadinya hubungan kerjasama antara dua pihak pertama ini. Pada dasarnya kesamaan nasib ini mengusung prinsip *'the enemy of my enemy is my friend'*. Namun perlu diingat lagi bahwa sifat alami negara adalah egois dimana mereka akan mementingkan kepentingannya sendiri. Maka dari itu, kerjasama berdasarkan persamaan nasib ini dapat terjadi ketika situasi kerjasama dirasa menguntungkan.
3. Homogenitas. Biasa disebut dengan kemiripan. Kemiripan ini muncul ketika antar negara memiliki relevansi dalam identitas korporat dan identitas tipe. Ketika negara mengatakan bahwa mereka memiliki kemiripan dengan negara lain bukan berarti mereka diidentifikasi sebagai negara yang sama pula. Wendt menjelaskan bahwa negara akan saling mengurangi ketegangan dan konflik yang mungkin dapat terjadi dari adanya perbedaan dari identitas korporat atau identitas tipe antar dua negara. Dengan begitu, kedua negara akan menjadi setara dan menciptakan kepentingan yang sama. Hal ini kemudian akan mempromosikan identitas kolektif dengan menurunkan ego masing-masing dan memunculkan keadaan bahwa negara tidak berpikir sebagai individu namun berpikir secara kelompok. Selain itu, homogenitas secara langsung membuat negara melihat

negara lain seperti diri mereka sendiri yang pada akhirnya akan membentuk sebuah kelompok.

4. *Self-restraint*. Menahan diri menjadi penting bagi terjadinya identitas kolektif antar negara dikarenakan hal ini menjadi faktor yang memperbolehkan negara untuk berinteraksi dengan negara lain. Kita tahu bahwa dalam dunia internasional yang dinamis, negara masih merasa terancam dengan prinsip ‘memakan atau dimakan’. *Self-restraint* dalam diri mencegah prinsip itu terjadi dengan menciptakan pemikiran untuk menghormati perbedaan. Hal ini kemudian akan membuat negara bertindak jauh dari kepentingan nasionalnya dan mencegah untuk melakukan intervensi ke negara lain. Maka dari itu dengan menahan diri, negara tidak akan mencoba menghapuskan perbedaan dalam negara lain yang tergabung dalam kelompok identitas kolektif yang sama. Negara lain juga akan tidak akan merasa ketakutan akan ‘dimakan’.

## **1.6. Definisi Konseptual**

### **1.6.1. Kebijakan luar negeri**

Kebijakan luar negeri merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh sebuah negara yang berasal dari penggabungan antara aktor dan kelompok yang berada di dalam batas negara maupun luar batas negara. Kebijakan luar negeri mengandung isu-isu politik domestik dan internasional dan dalam pelaksanaannya, kebijakan ini dilakukan dalam lingkungan internal dan internasional yang kompleks. Dalam pembuatan kebijakan luar negeri terdapat proses tawar-menawar dan kompromi yang mempengaruhi kepentingan dari aktor dan kelompok (Neack, 2003).

Keterlibatan aktor domestik dan internasional serta struktur internasional menjadi kunci utama dalam proses perumusan kebijakan luar negeri itu sendiri. Sisi domestik dan internasional tidak dapat dipisahkan sejak dahulu sampai sekarang (Halliday, 1999). Kemudian sifat alami dari struktur atau sistem internasional yang memainkan peran dalam mengembangkan aturan dan norma (Hill, 2003). Ditambah dengan hubungan negara tersebut dengan teman dan sekutu yang kemudian akan menghasilkan kebijakan luar negeri yang dapat menampung kepentingan mereka.

Berbicara mengenai tujuan kebijakan luar negeri maka kita akan mengetahui bahwa kebijakan luar negeri menjadi penting untuk keberlangsungan dan kemakmuran negara itu sendiri (Hill, 2003). Selain itu juga, kebijakan luar negeri ditujukan untuk memelihara hidup suatu negara (Rosenau, 1976). Tidak hanya berhenti di sana, kebijakan luar negeri dibuat untuk mencapai tujuan nasional sebuah negara (Plano & Olton, 1999). Maka dapat kita lihat bahwa tujuan kebijakan luar negeri adalah untuk mencapai kepentingan nasional yang berupa kelangsungan hidup, kemakmuran dan keamanan negara itu sendiri.

Kesimpulannya adalah kebijakan luar negeri merupakan sebuah strategi atau seperangkat pedoman yang dibuat oleh aktor domestik dan internasional dengan mempertimbangkan sistem internasional yang ditujukan bagi negara untuk bagaimana bersikap terhadap negara lain dengan tujuan untuk mencapai kepentingan nasionalnya.

### **1.6.2. Sentimen**

Secara etimologi, menurut KBBI, sentimen berarti pendapat atau pandangan yang didasarkan pada perasaan yang berlebih-lebihan terhadap sesuatu dan sering kali bertentangan. Selain itu, sentimen juga berarti rasa tidak suka, dendam dan iri hati (KBBI, 2023). Lebih lanjut lagi, sentimen dapat diartikan sebagai sebuah opini suka/tidak suka, rasa percaya/tidak percaya dan ingin/tak ingin serta sebuah perasaan sedih/marah/senang yang kesemuanya tergantung pada keputusan dari suatu subjek (Hovy, 2015).

Dalam konteks negara, sentimen ini kemudian akan dikaitkan dengan bagaimana satu negara memandang negara lain dengan sentimen yang sepenuhnya dikontrol oleh keputusan dari elit politik negara. Dengan meneliti sentimen yang ada dalam laporan-laporan yang dikeluarkan oleh negara, peneliti kemudian akan dapat mengukur opini mengenai suatu topik (Liu, 2020).

### **1.6.3. Anti-barat**

Göksel (2019) dalam tulisannya yang berjudul *Defying the system: The origins of anti-Westernism in the non-Western world and the case of Iran* menjelaskan bahwa negara-negara Barat sering kali menunjukkan tindakan negatif seperti melakukan kolonialisme, perbudakan dan penghinaan terhadap negara-negara non-barat. Kata 'Barat' merujuk pada sebuah pengaruh yang tidak diinginkan dari budaya Amerika dan Eropa dalam masyarakat non-barat (Buruma & Margalit, 2005). Maka dari itu, sentimen anti-barat merupakan sebuah reaksi irasional, ekstrimis dan fundamentalis terhadap hegemoni kebudayaan yang berasal dari negara-negara Barat seperti Inggris, Perancis dan Amerika Serikat.

Selain itu, sentimen ini muncul dikarenakan adanya reaksi terhadap hegemoni global dari negara-negara barat yang pada masa lalu telah menghambat bahkan menghilangkan secara penuh kemerdekaan dari negara lain pada masa kolonialisme dan neokolonialisme. Pada dasarnya, sentimen ini lebih merujuk kepada politik dimana semua negara yang memiliki sentimen anti-barat hampir tidak memiliki budaya yang sama. Sejarah menjadi faktor utama munculnya sentimen anti-barat ini. Sentimen ini muncul pada negara non-barat seperti Cina, Turki, Kuba dan beberapa negara-negara Arab sampai Jepang dan Korea Utara. Tidak hanya di negara-negara non-barat saja, anti-barat juga muncul di kalangan negara yang didominasi oleh masyarakat beragama kristen seperti Rusia (Makrides, 2009).

## **1.7. Definisi Operasional**

### **1.7.1. Kebijakan Luar Negeri**

Cina menjadi negara yang mendapatkan julukan *rising power* hal ini berkat kekuatan ekonomi dan militernya yang semakin lama semakin menguat dan didukung dengan strategi kebijakan luar negeri yang mumpuni juga. Kebijakan luar negeri Cina seperti *Belt Road Initiative* pada tahun 2013 yang berfokus pada perekonomian. *Belt Road Initiative* atau BRI bertujuan untuk menghubungkan ekonomi Eurasia melalui dua program yaitu program *Silk Road Economic Belt* dan *21st Century Maritime Silk Road* (Cai, 2017). Kebijakan luar negeri ini dinilai dapat menelan hingga \$100 miliar per tahun (Marbler & Shan, 2017).

Terakhir, tidak kalah penting juga adalah kebijakan luar negeri Cina terkait mitra dan aliansi terbesar Cina yaitu Rusia. Cina melalui Xi Jinping, menunjukkan keinginan untuk terus memperdalam hubungan Cina dan Rusia. Cina tidak mengabaikan bahwa Rusia menjadi mitra dagangnya dan ingin meningkatkan perdagangan di antara keduanya dengan sejumlah kerjasama-kerjasama bilateral lainnya. Selain itu, Cina ingin hubungan dengan Rusia tetap bertahan lama dan semakin menguat seiring berkembangnya zaman. *China-Russia Treaty of Good-Neighborliness and Friendly Cooperation* menjadi contoh nyata mengenai hubungan 70 tahun keduanya. Tidak menutup kemungkinan, Cina bersama Rusia akan membentuk kerjasama-kerjasama lainnya kedepannya. Kerja sama ini melingkupi banyak hal seperti ekonomi, energi, pertahanan dan aliansi.

### **1.7.2. Sentimen**

Sentimen yang akan dibahas adalah sentimen dari negara Cina dan Rusia selama berhubungan dengan negara lain, terutama negara-negara Barat sampai perang Ukraina-Rusia 2022 meletus. Cina dan Rusia diketahui memiliki pandangan yang berbeda dengan negara-negara Barat dan tidak jarang perbedaan tersebut memunculkan sentimen diantara kedua belah pihak. Dengan meneliti dari dokumen-dokumen resmi dan laporan serta pernyataan resmi dari pemerintah Cina dan Rusia maka akan dapat dilihat bagaimana sentimen terbentuk dalam negara Cina dan Rusia mengenai negara atau pihak lain.

### **1.7.3. Anti-barat**

Sentimen anti-barat di Cina dan Rusia sudah bukan menjadi hal yang mengejutkan lagi. Cina diketahui sudah menjadi anti-barat meningkat sejak tahun

1990 an (Xu, 2001). Pemikiran konspirasi anti-Barat di Cina dipicu oleh adanya rasa nasionalisme dan kebanggaan serta keinginan warga Cina untuk melindungi negaranya dari campur tangan negara asing terutama Barat. Masyarakat Cina percaya bahwa negara-negara Barat tidak dapat dipercaya dan mereka tidak dapat diharapkan untuk bekerja sama (Libman & Vollan, 2019). Dalam perkembangannya, sentimen anti-barat di Cina telah meningkat akibat beberapa faktor seperti ketegangan politik, perbedaan nilai-nilai budaya, dan perasaan perlakuan tidak adil oleh negara-negara Barat terhadap Tiongkok.

Selain itu, dalam perang Ukraina-Rusia 2022 ini, Rusia juga secara terang-terangan menunjukkan sentimennya terhadap Barat. Sentimen anti-Barat ini ditunjukkan baik dalam pidato maupun berita dan artikel milik pemerintah Rusia. Ketegangan politik antara Cina-Rusia dan Barat menyangkut kebijakan luar negeri, perdagangan, dan masalah hak asasi manusia, telah mempengaruhi pandangan masyarakat Cina dan Rusia terhadap negara-negara Barat. Perbedaan nilai-nilai politik, sosial, dan budaya antara kedua pihak dapat memperkuat sentimen anti-barat. Perbedaan nilai-nilai budaya ini mencakup pandangan tentang demokrasi, kebebasan mengekspresikan sesuatu, dan juga hak asasi manusia.

### **1.8. Argumen Penelitian**

Penulis berargumen bahwa Cina mendukung dan condong membantu Rusia selama perang Ukraina-Rusia tahun 2022 berlangsung. Hal ini dilatarbelakangi oleh identitas kolektif sentimen anti-Barat pada Cina dan Rusia. Sentimen anti-Barat mempengaruhi kebijakan luar negeri Cina untuk membantu Rusia dan mengabaikan ancaman-ancaman dari Barat. Selain itu, sentimen anti-Barat

memudahkan bagi Cina dan Rusia untuk kerja sama dikarenakan kedua negara memiliki pandangan dan visi yang sama terhadap Barat.

## **1.9. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dimana prosedur pengamatan dan penalaran yang berdasarkan peristiwa sosial dan persoalan yang ditemui manusia (John W. Creswell, 2018). Pendekatan kualitatif meliputi beberapa tahapan yaitu pengumpulan data dan analisis data dari studi literatur yang kemudian dikaitkan dengan persoalan yang memakai salah satu teori dalam Hubungan Internasional yaitu realisme neoklasik.

### **1.9.1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif yang berusaha untuk menggambarkan sebuah peristiwa. Dengan begitu, penulis berusaha menggambarkan bagaimana identitas dan kebijakan luar negeri Cina mempengaruhi hubungan antara Cina dan Rusia.

### **1.9.2. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian yang digunakan kali ini adalah identitas Cina dan kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh negara Cina.

### **1.9.3. Situs Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan metode *desk research* yang bertempat di Kota Semarang. *Desk research* berguna untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian yang akan dilakukan.

#### **1.9.4. Sumber Data**

Data yang dibutuhkan adalah data primer dan sekunder. Data primer didapat dari situs-situs resmi pemerintahan terkait baik yang berbentuk tulisan maupun lisan. Sumber sekunder didapat dari literatur-literatur yang tersedia baik dalam jaringan maupun luar jaringan.

#### **1.9.5. Jenis Data**

Jenis data yang dibutuhkan berupa rekaman wawancara, artikel, buku, gambar grafik, dokumen resmi dan literatur-literatur lainnya. Jenis-jenis data tersebut dibutuhkan oleh penulis untuk melakukan penelitian.

#### **1.9.6. Teknik Analisis Data**

Teknik yang digunakan untuk mengolah data adalah metode kongruen. Metode kongruen ini berfungsi untuk mencari kecocokan antara variabel independen dari konsep yang digunakan dan data-data yang diperoleh selama proses penelitian. Peneliti kemudian akan menafsirkan data yang ditemukan menggunakan kaca mata konsep identitas untuk melihat apakah asumsi konsep tersebut cocok dengan data. Kemudian metode kongruen ini digunakan untuk melihat hubungan sebab-akibat dari identitas kolektif anti barat dan dampaknya terhadap kebijakan luar negeri Cina mengenai hubungannya dengan Rusia.